



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Jl. Sriwijaya No. 1 Tanjungpandan KAB. BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

<http://pn-tanjungpandan.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSINILAI INDEKS
3,99 / 99,79%

Jumlah	47 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 26 PEREMPUAN : 21
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 20 SMU : 25 S2 : 2 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 2 SWASTA : 8 TNI : 0 WIRAUSAHA : 1 POLRI : 6 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 30

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? | 3,957 |
| 2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,979 |
| 3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? | 3,979 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Untuk Indikator Perbuatan Curang

Memperketat pengawasan pada area PTSP dengan menempatkan petugas pengawas (CCTV dan Hidden Viewer) untuk memastikan tidak ada transaksi keuangan di luar biaya resmi yang ditetapkan dalam radius kantor Pengadilan.

2. Untuk Indikator Transaksi Biaya

Agar dibuat penetapan rincian besaran tarif layanan dan dipublikasikan pada situs resmi Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

3. Untuk Indikator Percaloan

Menghimbau masyarakat melalui pengeras suara secara berkala agar tidak menggunakan jasa perantara/caloe dan hanya berurusan melalui petugas resmi di meja PTSP, serta agar Monitor Ruang Tunggu menampilkan Running Text terkait larangan petugas menerima pemberian berupa hadiah atau tip dalam bentuk apapun dan selalu memutar audio notifikasi peringatan perilaku Anti Gratifikasi;

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

7 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri



Tutup